

## PSIKOLOGI POLITIK KELOMPOK DIFABEL PADA PILKADA TAKALAR TAHUN 2017

**Jaya Kurniawan Auza**

Program Magister Ilmu Politik - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

Email: [jaya.igro@gmail.com](mailto:jaya.igro@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study is aimed to analyze the phenomenon of political psychology towards the person with disabilities in Sulawesi Selatan, mainly on Takalar in regional head elections or PILKADA in 2017. This study is used descriptive analysis to describe the variable which relevant to the phenomenon has analyzed. Data is collected through interviews and observation on the area which has a quantity of the person with disabilities, the institution which held the election, the Regional House of Representative in Takalar, and the area of Galesong. Data is also collected from library research where the data are from books, journals, newspapers, archives, agendas, and other online media records. The result of the study found that there is still a lack of awareness either from institutions or the regional head candidates of the election towards the person with disabilities due to the inferior of their participation, hence either institution or the regional head candidates consider that the participation of person with disabilities does not have an effect on the elections in Takalar.*

**Keywords:** *political psychology, people with disabilities, regional head elections (PILKADA)*

### **PENDAHULUAN**

Penyandang difabel (*different ability*) atau disabilitas merupakan kondisi yang dialami oleh sebagian masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia, baik disabilitas yang terjadi sejak lahir atau karena kondisi tertentu seperti kecelakaan atau bencana alam sehingga membuat seseorang menjadi penyandang disabilitas. Difabel

menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan bukti kehadiran negara dan pemerintah bagi penyandang difabel. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menegaskan kedudukan penyandang difabel sebagai subjek yang diakui keberadaannya, yaitu manusia yang bermartabat dan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Secara khusus, di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 menegaskan hak politik penyandang difabel yang diantaranya meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, berperan serta secara aktif dalam sistem Pemilihan Umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilihan Umum dan memperoleh pendidikan politik. Hal tersebut mengakibatkan negara harus menjamin hak-hak politik penyandang difabel atas dasar kesetaraan dengan warga Negara yang lainnya. Jaminan itu diberikan agar penyandang difabel dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kehidupan politik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada tahun 2017 yang dirilis oleh KPU Kabupaten Takalar terdapat 205.418 pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih yang tergolong tinggi, yakni sebesar 83,5%. Namun disayangkan, karena tingkat partisipasi yang terlihat cukup tinggi tersebut harus tercoreng oleh rendahnya tingkat partisipasi pemilih kelompok difabel. Terdapat 609 orang dari kelompok difabel yang terdaftar dalam DPT Pilkada Takalar<sup>1</sup>, namun hanya 176 orang atau 30 persen saja yang menggunakan hak pilihnya<sup>2</sup>.

Penyebab rendahnya tingkat penggunaan hak pilih oleh penyandang difabel disebabkan oleh tiga faktor. *Pertama*, aksesibilitas dalam menyediakan alat bantu pencoblosan yang kurang atau bahkan tak terfasilitasi, lokasi pemilihan yang tidak

---

<sup>1</sup> Data KPU Kabupaten Takalar

<sup>2</sup> Data Organisasi PERDIK Sulawesi Selatan

aksesibel atau tidak mudah dijangkau oleh difabel, serta komunikasi dan informasi yang tak ramah terhadap difabel. *Kedua*, tidak adanya data difabel yang akurat dalam kepesertaan sebagai pemilih. Bagi penyelenggara Pemilu, ketidaktersediaan data sering dijadikan sebagai alasan tidak tersedianya TPS yang aksesibel, serta tidak tersedianya alat bantu pencoblosan. Data yang tidak valid juga memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi difabel, diantaranya tak dikenalnya kebutuhan difabel untuk lebih berpartisipasi secara optimal dalam Pemilu. *Ketiga*, referensi pilihan yang sebagian besar difabel tidak mempunyai referensi tentang pilihan yang pantas dipilih. Model kampanye yang banyak dipergunakan oleh para kontestan Pemilu tidak banyak membantu difabel untuk mengenal calon-calon pilihan mereka untuk kemudian menentukan pilihan (Salim, 2015). Selain itu, penyediaan informasi pemilih juga kurang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan difabel terkait informasi dan komunikasi yang aksesibel.

Pilkada sebagai ajang perwujudan demokrasi yang menjunjung tinggi azas kesetaraan harus dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk kelompok difabel. Pilkada yang dapat diakses bukan hanya berarti tersedianya fasilitas dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan difabel di TPS, tetapi juga berarti model pendekatan sosialisasi materi Pilkada yang mampu dipahami oleh kelompok difabel. Isi materi atau pesan sosialisasi yang benar tidak cukup apabila tidak ditunjang dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pemilih difabel. Seperti yang ditemukan (O. Yandarisman, F. ., 2014) bahwa meski telah dilakukan proses sosialisasi namun masih kurang belum efektif untuk mengakomodir seluruh kepentingan penyandang cacat dalam pemilihan umum. Selain itu masih banyak institusi atau lembaga pemerintahan yang masih belum maksimal dalam melakukan aksesibilitas bagi difabel (Merly, 2016). Riwanto (Riwanto, 2018) juga menambahkan bahwa salah satu segmen pemilih yang kurang mendapat perhatian dan terdiskriminasi secara sistemik dalam Pemilu di Indonesia adalah kelompok disabilitas. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh minimnya akses bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu di Indonesia.

Meskipun telah terdapat regulasi dan mekanisme untuk melindungi hak pilih kelompok penyandang disabilitas, namun hal tersebut tidak mencegah terjadinya

pelanggaran dan tidak terpenuhinya hak mereka sebagai warga negara dalam Pemilu. Sehingga, pendekatan secara khusus penting dilakukan oleh pemangku kepentingan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pendekatan psikologi politik KPU dan Paslon (Pasangan Calon) kepada Kelompok difabel dan mengetahui respons kelompok difabel terhadap pendekatan psikologi politik tersebut. Psikologi politik telah muncul sebagai sebuah bidang penting ilmu politik dan psikologi, yang memungkinkan kita menjelaskan banyak aspek perilaku politik (Muluk et al., 2012).

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menggambarkan secara faktual tentang respons terhadap sosialisasi dan perilaku pemilih difabel sehingga memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Takalar tahun 2017. Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Takalar. Penelitian dilakukan pada daerah domisili kelompok penyandang difabel, di instansi Penyelenggara Pemilu, DPRD Kabupaten Takalar dan wilayah Galesong yang memiliki jumlah pemilih difabel terbesar berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Takalar tahun 2017.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan studi kepustakaan yang datanya bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, koran/majalah, arsip-arsip, agenda, catatan-catatan maupun melalui media online lainnya yang dianggap relevan dan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Data juga diperoleh melalui studi dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap Ketua KPU Kabupaten Takalar, Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar, Anggota KPU Kabupaten Takalar Divisi Teknis/Sosialisasi, Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Takalar, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, Direktur Perdik Sulawesi Selatan, Pengurus komunitas difabel yang ada di Takalar, Pemilih difabel yang menggunakan hak pilih, Pemilih difabel yang tidak menggunakan hak pilih, Masyarakat non difabel, Psikolog, Media.

Teknik *snow ball* juga digunakan dalam penelitian ini, yakni melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dari satu informan bergulir ke informan lainnya yang direkomendasikan dan memenuhi kriteria hingga mengalami titik jenuh. Teknik *snow ball* ini khususnya dilakukan untuk informan dari kalangan pemilih difabel. Adapun jumlah penduduk difabel yang telah memiliki hak pilih di Kabupaten Takalar berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Takalar Tahun 2017 adalah sebanyak 609 jiwa dengan rincian di Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Disabilitas Pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1	Mappakasunggu	9	27	15	16	31	
2	Mangarabombang	12	46	40	48	88	
3	Polongbengkeng Selatan	10	34	38	52	90	
4	Polongbengkeng Utara	18	57	21	21	42	
5	Galesong Selatan	12	34	41	44	85	
6	Galesong Utara	10	43	25	31	56	
7	Pattalassang	9	43	30	34	64	
8	Sanrobone	6	18	12	13	25	
9	Galesong	14	49	56	72	128	
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>351</b>	<b>278</b>	<b>331</b>	<b>609</b>	

Sumber: KPU Kabupaten Takalar

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk difabel paling banyak adalah Galesong, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Sanrobone. Peneliti memusatkan penelitian di Kecamatan Galesong, Galesong Selatan dan Galesong Utara sebagai wilayah yang memilki jumlah pemilih difabel terbesar di Kabupaten Takalar.

## **PENDEKATAN PSIKOLOGI POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN TAKALAR KEPADA KELOMPOK DIFABEL**

### ***Pertemuan Tatap Muka***

Pendekatan utama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Takalar kepada kelompok difabel adalah sosialisasi dalam bentuk pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka secara garis besar dilakukan melalui dua metode. Pertama, sosialisasi melalui Relawan Demokrasi. Kedua, pendekatan melalui Sekolah Luar Biasa dan organisasi difabel. Penyandang difabel yang direkrut oleh KPU Kabupaten Takalar menjadi Relawan Demokrasi ini hanya satu orang dan berasal dari kalangan difabel rungu/wicara. Berdasarkan Teori S-O-R yang menekankan pada aspek komunikator, media dan karakter komunikan, maka pendekatan atau sosialisasi khusus di kalangan pemilih difabel rungu/wicara sudah tepat. Kondisi, karakter dan bahasa isyarat yang digunakan antara Relasi dengan pemilih difabel rungu/wicara memiliki kesamaan yang mana hanya dipahami di antara kelompok difabel rungu/wicara, sehingga pendekatan yang dilakukan lebih mudah untuk diterima. Namun, jenis difabel yang ada di Kabupaten Takalar tidak hanya difabel rungu/wicara dan menyebar di seluruh kecamatan hingga desa, sehingga Relasi tidak optimal dalam melakukan pendekatan kepada pemilih difabel lainnya utamanya difabel netra dan daksa.

Strategi KPU Kabupaten Takalar dalam mendekati kelompok difabel selain melalui Relawan Demokrasi juga dengan melakukan pendekatan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). KPU melakukan kunjungan ke SLB dengan menyelenggarakan kegiatan berupa pertemuan sosialisasi tatap muka. Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan pertemuan tatap muka adalah para siswa dan guru SLB. Alimuddin menyatakan bahwa model sosialisasi berupa pertemuan tatap muka ini dipusatkan di SLB yang ada di

Takalar<sup>3</sup>. Pertemuan tatap muka ini tidak hanya ditujukan kepada siswa difabel, tetapi juga untuk guru-guru SLB. Guru-guru SLB dibekali dengan pendidikan dan informasi kepemiluan, diharapkan guru-guru SLB tersebut melakukan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan lebih lanjut kepada para siswa SLB yang menjadi pemilih dalam Pilkada Takalar tahun 2017 dan penyandang difabel lainnya di sekitar wilayah tempat tinggal. Pelaksanaan kegiatan pertemuan tatap muka ini dilaksanakan di SLB Negeri 1 dan 2 Kabupaten Takalar. Anzar Hasanuddin selaku Kasubag Teknis KPU Kabupaten Takalar mengatakan bahwa *“Materi yang disampaikan dalam kegiatan pertemuan tatap muka tersebut adalah tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada, tata cara memilih, profil Paslou, ajakan memilih dan hal-hal lain seputar Pilkada”*<sup>4</sup>.

### ***Alat Peraga Sosialisasi***

Model pendekatan berupa alat peraga ini ditujukan secara umum kepada masyarakat, tidak ada alat peraga yang secara khusus dibuat untuk kelompok difabel. Alat peraga sosialisasi yang dibuat oleh KPU adalah spanduk, baligho, dan banner yang semua desainnya berupa gambar dengan tulisan yang memuat informasi seputar Pilkada. Alat peraga sosialisasi yang dibuat dan disebar ke seluruh desa oleh KPU bersifat umum untuk seluruh kalangan masyarakat dan tidak ada yang secara khusus diperuntukkan bagi kelompok difabel. Meskipun tidak ada alat peraga sosialisasi khusus untuk difabel, namun masih dapat diakses oleh sebagian pemilih difabel seperti rungu/wicara dan daksa yang mengandalkan indera penglihatannya dalam mengenali suatu objek.

Namun alat peraga yang dibuat oleh KPU dinilai tidak ramah bagi sebagian penyandang difabel serta kurangnya sosialisasi secara khusus kepada difabel disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah waktu, SDM dan anggaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anzar Hasanuddin bahwa:

*“Kendala yang dihadapi oleh KPU itu karena keterbatasan anggaran, waktu dan SDM. Ini untung sudah ada tenaga-tenaga pendukung yang bergabung di sini. Saya*

---

<sup>3</sup> Wawancara pada hari Kamis, 25 Oktober 2018 pukul 11.00 WITA di Kantor KPU Kab. Takalar

<sup>4</sup> Wawancara pada hari Kamis, 25 Oktober 2018 pukul 11.00 WITA di Kantor KPU Kab. Takalar

*di sini di bagian Teknis itu saya sendiri yang tahu IT, dua staf saya yang lalu PNS tapi tidak tahu IT. Saya tinggal menunggu perintah dari komisioner saya, maunya seperti apa. Tidak bisa lagi berkreasi bagaimana kreativitas kalo begitu".<sup>5</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara, pihak KPU Kabupaten Takalar menyebutkan empat kendala atau tantangan yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi kepada kelompok difabel. Pertama, anggaran sosialisasi yang minim sehingga membatasi ruang gerak sosialisasi. Hal ini sejalan dengan Rita, et al.(Rita et al., 2016) yang menyatakan bahwa tidak memiliki atau terbatasnya dana untuk membuat brosur braile khusus tuna netra. Kedua, waktu yang sangat padat dalam menjalankan tahapan Pilkada, dimana pelaksanaan setiap kegiatan tahapan harus dijalankan tepat waktu. Ketiga, Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim dari segi jumlah dan kreativitas. Seperti yang ditemukan oleh Amrurobbi et al.(Amrurobbi et al., 2021) bahwa minimnya pendidikan pemilih mempengaruhi rendahnya partisipasi dan pemahaman difabel terhadap informasi Pemilihan. Selain itu, kendala dapat terjadi ketika KPU tidak inovatif dalam mendata pemilih difabel sehingga terdapat potensi tidak terdaftarnya pemilih difabel dalam daftar pemilih(Amrurobbi et al., 2021). Keempat, tidak adanya pedoman khusus sosialisasi kepada kelompok difabel. Nurbeti dan Chandra(Nurbeti & Chandra SY, 2021) menjelaskan bahwa sosialisasi terbatas hanya diberikan kepada penyandang disabilitas yang mengikuti atau berada dalam komunitas, sedangkan mereka yang diluar komunitas tidak mendapatkan sosialisasi. Selain itu, Waisnawa dan Dewi(Waisnawa & Dewi, 2019) juga mejelaskan bahwa keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pemilu dibatasi oleh keterbatasan akses informasi, keterbatasan pengetahuan, ketidaktersediaan sejumlah instrument teknis, dan persepsi masyarakat yang memandang rendah kelompok penyandang disabilitas sebagai pemilih. Hal-hal inilah yang membuat pihak KPU Kabupaten Takalar sulit merancang model sosialisasi yang ramah bagi difabel termasuk dalam hal alat peraga sosialisasi, karena tidak adanya pedoman turunan dari KPU RI sebagai dasar untuk membuat alat peraga.

---

<sup>5</sup> Wawancara pada hari kamis, 25 Oktober 2018 pukul 11.00 wita, di Kantor KPU Kabupaten Takalar

### ***Penyediaan Penerjemah (Interpreter)***

Debat Kandidat Pilkada Takalar tahun 2017 merupakan salah satu kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Takalar. Aspek yang menarik dalam kegiatan Debat Kandidat Pilkada Takalar adalah adanya penerjemah (interpreter) di dua media televisi yang menyiarkan secara langsung. Ini menjadi yang pertama dilakukan di Sulawesi Selatan. Belum pernah ada sebelumnya KPU kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang menyiapkan interpreter dalam acara debat kandidat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Juselim Sammak bahwa:

*“Jadi dua-duanya dipakai, ada yang debat pertama ada yang debat kedua. Celebes TV di debat pertama dan Go-TV di debat kedua. Kemudian dua-duanya pakai dari interpreter. Penyediaan interpreter ini kami minta kepada organisasi Perdik bahwa kami mau ada penerjemah dan itu diapresiasi. Kami siapkan anggarannya untuk itu dan Perdik sendiri yang menunjuk, sekalipun ada yang kami kenal dari KPU yang bisa tapi kami nda mau, Perdik sendiri yang rekomendasi biar tidak ada kesan kami ini diskriminasi”.*<sup>6</sup>

Ketua KPU Kabupaten Takalar, menjelaskan bahwa awal tercetusnya ide untuk menyediakan penerjemah atau interpreter pada Debat Kandidat Pilkada Takalar ini karena data pemilih difabel rungu/wicara yang cukup banyak di Kabupaten Takalar. Pemilihan dua media televisi lokal, yaitu Celebes TV yang mencakup wilayah pegunungan dan Go-TV yang mencakup wilayah pantai digunakan untuk menyiarkan acara debat kandidat dengan strategi yang baik dalam rangka menjangkau pemilih difabel rungu/wicara dengan kondisi alam yang berbeda. Penerjemah bahasa isyarat merupakan jembatan untuk penyandang disabilitas rungu/wicara untuk mengetahui apa yang dilihatnya (Aritonang & Gatra, 2014). KPU Kabupaten Takalar bekerja sama dengan organisasi Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan (Perdik) Sulawesi Selatan dalam penyediaan interpreter Debat Kandidat. Bahkan, Perdik juga mendorong KPU agar dapat memasukkan isu disabilitas dalam soal Debat Kandidat kedua.

---

<sup>6</sup> Wawancara pada hari Selasa, 30 Oktober 2018 pukul 20.00 wita, di MPta Café, Sungguminasa, Kabupaten Gowa

Penyediaan interpreter dan adanya soal tentang isu difabel pada Debat Kandidat Pilkada Takalar ini membuat penonton dari kalangan difabel, dapat mengetahui proses debat dan pembahasan di dalamnya. Interpreter yang dilaksanakan dan isu difabel yang diangkat di dalam Debat Kandidat Pilkada Takalar sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hovland et al. (1953, cited in Fadlillah(Fadlillah, 2019)) bahwa keberhasilan teori S-O-R ditentukan oleh komunikator, media, dan karakteristik komunikan. Teori S-O-R mengasumsi bahwa kata-kata verbal, isyarat non-verbal, dan simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara tertentu(Abidin & Abidin, 2021). Interpreter sebagai juru bahasa acara debat melalui media audio visual seperti televisi merupakan model sosialisasi yang efektif dan tepat untuk memberikan edukasi politik, khususnya kepada penyandang difabel rungu/wicara.

Sehingga dapat dinilai bahwa KPU Kabupaten Takalar sebagai Penyelenggara Pilkada telah berlaku adil dan memaksimalkan usaha dalam hal memfasilitasi kegiatan sosialisasi atau kampanye kedua Paslon. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU kepada kelompok difabel juga dinilai sudah baik, karena ada peningkatan jumlah data pemilih difabel dibanding Pemilu sebelumnya serta desain TPS yang lebih aksesibel.

### **Pendekatan Psikologi Politik yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Takalar Kepada Kelompok Difabel**

Pendekatan dan sosialisasi Pilkada untuk kelompok pemilih khususnya difabel bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU, tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah bersama tim pemenangan masing-masing dalam hal memperkenalkan profil, visi dan misi, serta program kerja.

#### ***Pendekatan Psikologi Politik oleh Paslon Nomor 1***

Sarana yang digunakan oleh Tim Paslon nomor 1 untuk mengkampanyekan keberhasilan program petahanan adalah alat peraga dan bahan kampanye. Seperti yang dikatakan oleh H. Nurdin, anggota Tim Pemenangan Paslon nomor 1:

*“Kami menggunakan alat peraga itu seperti spanduk dan baligho untuk mensosialisasikan pak Paslon nomor 1. Kemudian, ada juga bahan kampanye seperti kalender dan baju kaos. Kalau saya sendiri buat baju kaos sampai 2.000 lembar yang kami sebar ke berbagai desa. Informasi di dalam alat peraga dan bahan kampanye itu berupa tagline ‘naciniki mata’ dan program-program yang berhasil dijalankan oleh Paslon nomor 1”.*<sup>7</sup>

Selain alat peraga, Paslon nomor 1 juga menggunakan media massa. Media cetak digunakan sebagai sarana sosialisasi, karena dianggap sebagai sumber informasi yang telah lama memasyarakat dan dapat menjangkau seluruh kalangan, termasuk difabel. Begitu pula dengan media online yang mulai akrab diakses oleh sebagian masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan berita-berita perkembangan yang terjadi dimana pun.

Selain itu paslon ini juga menggunakan pendekatan melalui dinas sosial. Meskipun, Paslon nomor urut 1 selama masa sosialisasi dan kampanye tidak pernah melakukan pertemuan secara khusus dengan kelompok difabel yang ada di Takalar, namun pola pendekatan pertama yang dilakukan adalah dengan kebijakan peningkatan anggaran Pendamping Penerima Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Takalar. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Bidang Media Tim Pemenangan Paslon nomor 1:

*“Saya cuma mengatakan bisa nda saya ketemu dengan mereka, tapi Dinas Sosial mengatakan cukup kami yang mengkonsolidasikan. Jadi dalam kapasitas saya selaku sekretaris partai tidak melakukan penggalangan secara langsung di kelompok penyandang cacat, tapi mengadvokasi mereka lewat penganggaran. Dinas Sosial sudah paham goalnya kalau mau Pilkada saya bicara tentang itu. Jadi tidak ada sosialisasi secara langsung yang kami lakukan.”*<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara pada hari senin, 1 Juli 2019 pukul 13.00 wita, di DPRD Kab.Takalar

<sup>8</sup> Wawancara pada hari rabu, 28 November 2018 pukul 11.00 wita, di DPRD Kabupaten Takalar.

Pasangan Paslon nomor 1 bersama tim menggunakan kekuasaan yang dimiliki dengan melakukan advokasi anggaran dengan menaikkan anggaran honor untuk Pendamping Penerima Bantuan Sosial. Penerima bantuan sosial ini termasuk di dalamnya penyandang difabel yang telah diseleksi dan memenuhi syarat. Advokasi peningkatan anggaran yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 1 bersama tim dalam rangka sosialisasi keberhasilan program-program petahana kepada kelompok difabel melalui para Pendamping Penerima bantuan sosial. Dukungan dari para pendamping penerima bantuan sosial menurut penulis tentu dibutuhkan, karena dapat menjadi mediator dalam mendekati dan mensosialisasikan program dan prestasi yang telah dicapai oleh petahanan di kalangan penerima bantuan sosial tanpa Paslon atau tim bertemu secara langsung.

### ***Pendekatan Psikologi Politik Paslon nomor 2***

Model sosialisasi utama yang dilakukan oleh Paslon nomor 2 bersama tim untuk dapat bersaing dengan Paslon nomor 1 adalah pertemuan tatap muka atau kampanye *door to door*. Sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak ada sosialisasi yang secara khusus dilakukan oleh Tim Paslon nomor 2 kepada kelompok difabel. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor 2:

*“Secara spesifik segmen difabel ini tidak kita lakukan sosialisasi, butuh strategi khusus dan kita berkejaran sama waktu sehingga tidak ada waktu untuk dikhususkan ke disabilitas ini. Difabel ini khusus di Takalar bagi partai politik “belum terlalu dilirik” karena memang hampir tidak ada ajang sosialisasinya atau bangunan komunitas misalnya komunitas difabel... Seharusnya ke depan disabilitas itu unjuk diri, pemerhati disabilitas ini siapa lalu dia gaungkan ini anggotanya”.*<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Tim Paslon nomor 2 hanya melakukan kegiatan sosialisasi yang bersifat umum untuk seluruh kalangan masyarakat, tidak ada strategi atau model sosialisasi yang sengaja dirancang secara khusus untuk pemilih

---

<sup>9</sup> Wawancara pada hari senin, 5 November 2018 pukul 10.30 wita, di DPRD Kabupaten Takalar.

difabel di Kabupaten Takalar, karena kendala waktu yang dianggap tidak banyak untuk meraup dukungan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Tim Paslon nomor urut 2 juga mengeluhkan kurangnya data dan informasi terkait dengan warga disabilitas yang ada di Kabupaten Takalar, bahkan cenderung menyalahkan kondisi dimana tidak adanya pihak atau organisasi difabel yang memperkenalkan dirinya di tengah publik.

Model sosialisasi *door to door* atau dalam istilah Tim Paslon nomor 2 adalah *direct selling* dianggap sebagai pendekatan yang sangat efektif untuk mendapatkan simpati dan meraup dukungan suara dari pemilih. Hal tersebut disebabkan karena kampanye *door to door* tidak mengganggu kenyamanan masyarakat karena tak ada arak-arakan massa, selain itu dapat silaturahmi dan biayanya pun murah. Model sosialisasi ini juga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok difabel yang sebagian diantaranya memiliki keterbatasan dalam gerak dan interaksi sosial.

Sama seperti Paslon nomor 1, Paslon nomor 2 juga menggunakan model sosialisasi politik berupa APK. Namun, dari aspek desain APK yang ditampilkan baik oleh Paslon nomor 1 maupun Paslon nomor 2 terkesan masih bersifat umum atau tidak ada desain khusus sosialisasi untuk kelompok difabel. Model atau desain Alat Peraga Kampanye (APK) dari para kandidat seperti spanduk, baligho, banner yang terpajang di berbagai ruas jalan Kabupaten Takalar serta bahan-bahan sosialisasi masih belum aksesibel bagi penyandang difabel, khususnya difabel netra.

Selain itu Paslon nomor 2 juga menggunakan media massa sebagai salah satu cara pendekatan dan kampanye kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, media yang digunakan oleh Paslon nomor 2 dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat adalah media cetak dan online. Divisi Humas Tim Paslon nomor 2 merilis berita kegiatan Paslon nomor 2 kemudian mengirim ke beberapa media online. Namun karena minimnya dana sosialiasi, Paslon nomor 2 lebih memanfaatkan hubungan pertemanan untuk merilis dimedia online. Penulis beranggapan bahwa Tim Paslon nomor 2 memilih media online tentu bukan tanpa alasan. Dana sosialisasi yang minim dan pertumbuhan pengguna internet yang terus meningkat dari segala kalangan membuat media online menjadi salah satu sarana andalan dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih,

termasuk segmen difabel. Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat diyakini tidak hanya mengubah gaya atau model interaksi warga non difabel, tetapi juga warga difabel, sehingga model sosialisasi secara online dianggap dapat memberikan edukasi atau sosialisasi politik kepada pemilih berkebutuhan khusus.

## **RESPONS KELOMPOK DIFABEL TERHADAP PENDEKATAN YANG DILAKUKAN OLEH KPU SERTA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR**

### ***Respons Difabel Netra (Buta)***

Penyandang difabel netra merupakan salah satu jenis difabilitas yang paling merasakan baik atau buruknya model pendekatan baik yang dilakukan oleh KPU maupun Paslon dalam setiap perhelatan Pilkada. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya alat bantu sosialisasi yang tepat dan mudah dipahami oleh pemilih difabel netra. Desain atau model sosialisasi yang dibuat oleh KPU dan Paslon sebagian besar masih harus mengandalkan indera penglihatan untuk mengetahui isi pesannya, utamanya sosialisasi dalam rangka memperkenalkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Takalar tahun 2017.

Sosialisasi politik kepada kelompok difabel berupa Alat Peraga Kampanye (APK) seperti spanduk, baligho, banner dan sebagainya dirasakan sulit bahkan tidak dapat dipahami oleh penyandang difabel netra. Kurangnya referensi pilihan ini disebabkan oleh minimnya bahkan tidak ada sosialisasi atau pendekatan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pilkada yakni KPU Kabupaten Takalar dan tim pemenangan Paslon kepada dirinya sebagai salah seorang penyandang difabel yang memiliki hak pilih. Sosialisasi dan pendekatan yang tidak tepat membuat aspek kognitif tidak berubah, bahkan mengalami kekecewaan dan sikap antipati, karena tidak ada sosialisasi secara langsung dari KPU maupun dari tim Paslon. Perasaan kecewa timbul karena merasa diabaikan haknya oleh *Pemangku kepentingan* Pilkada untuk memperoleh informasi melalui media yang aksesibel atau ramah bagi dirinya sebagai penyandang difabel netra.

Tidak hanya dalam bentuk gambar dan tulisan, sosialisasi politik juga dilakukan dalam bentuk audio melalui siaran radio lokal dan audio visual melalui siaran televisi.

Sebagaimana diungkapkan oleh Haris Akbar selaku salah seorang warga difabel netra yang ikut menggunakan hak pilihnya di Pilkada Takalar tahun 2017:

*“Kalau saya biasanya melalui radio dan televisi. Kalau radio kan didengar dan disebutkan tentang kerja-kerja dari Calon Bupati. Televisi juga bisa didengar meskipun tidak dilihat. Waktu itu juga ada acara Debat Calon Bupati di televisi saya ikuti. Menurut saya sudah bagus dengan adanya informasi melalui radio dan televisi. Saya juga ikut mengajak istri dan keluarga untuk ikut memilih. Saya berharap ke depan ada sosialisasi secara langsung kepada saya dan teman-teman yang tidak dapat melihat serta disiapkan alat bantu braille tentang informasi Pilkada”.<sup>10</sup>*

Haris Akbar merespons positif sosialisasi melalui media televisi dan radio. Haris Akbar tentu lebih banyak mengandalkan indera pendengaran untuk mengetahui informasi terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, Haris juga merasakan kekecewaan dari sisi afektif, karena selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Takalar tidak pernah ada dari pihak KPU atau tim pemenangan Paslon yang melakukan sosialisasi secara langsung untuk memperkenalkan para Paslon Bupati dan Wakil Bupati Takalar. Sosialisasi langsung secara tatap muka tidak hanya dibutuhkan oleh penyandang difabel netra seperti Haris Akbar agar dapat mengetahui lebih banyak informasi terkait profil Paslon beserta visi misinya, tetapi juga akan memberi dampak positif terhadap perasaan pemilih difabel bahwa dirinya merupakan bagian dari warga masyarakat yang mendapat perhatian yang sama dengan warga masyarakat lainnya. Dampak positif lainnya adalah penyandang disabilitas menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain (Setyaningsih & Gutama, 2016). Karena pada dasarnya, penyandang difabel tidak butuh untuk dikasihani, tetapi butuh untuk diperhatikan dengan dipenuhi hak-haknya.

Respons konatif pada dasarnya merupakan kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap suatu dengan cara-cara tertentu. Respons konatif Haris Akbar terlihat

---

<sup>10</sup> Wawancara pada hari sabtu, 1 Desember 2018 pukul 11.30 wita, di rumah informan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

pada pernyataannya yang menanggapi positif model sosialisasi melalui media televisi dan radio sehingga ikut menggunakan hak pilih, bahkan mengajak istri dan keluarganya pada Pilkada Takalar tahun 2017. Haris Akbar juga memberi masukan kepada KPU dan Tim Paslon agar dapat lebih memperhatikan kebutuhan pemilih difabel netra dengan menyiapkan alat bantu sosialisasi berupa selebaran dengan tulisan braille pada Pilkada dan Pemilu berikutnya. Alat bantu sosialisasi berupa tulisan braille yang berisi informasi mengenai profil serta visi dan misi kandidat akan sangat membantu pemilih difabel netra dalam mengenal dan menentukan pilihan calon pemimpinnya.

Sosialisasi tatap muka secara langsung mendapat respons positif dari pemilih difabel netra lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asdar selaku pelajar difabel netra di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Takalar yang ikut menggunakan hak pilihnya:

*"KPU pernah datang sosialisasi Pilkada di sekolah dan saya bisa mengerti penjelasan tentang bagaimana cara memilih dan bisa tahu siapa saja calon Bupati Takalar. Saya berharap supaya KPU nanti bisa lebih sering mengadakan pertemuan sosialisasi di sekolah".<sup>11</sup>*

Asdar merespons positif kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Takalar di sekolahnya. Asdar tidak merasa canggung mengikuti kegiatan sosialisasi di SLB, karena bergabung bersama dengan teman-teman penyandang difabel. Namun, Asdar juga merasa kecewa karena selain sosialisasi yang hanya satu kali diadakan oleh KPU di sekolah, metode sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU dan Tim Paslon lebih banyak menggunakan media gambar dan tulisan yang tidak bisa dilihat dan diketahui secara mandiri. Seperti yang diungkapkan oleh Asdar lebih lanjut:

*"Saya merasa kecewa karena yang lalu tidak ada alat bantu sosialisasi selain berupa penyampaian materi saja di sekolah. Seharusnya KPU dan tim sukses bisa menyiapkan alat bantu seperti selebaran atau buku dengan tulisan braille supaya kami bisa membaca secara mandiri dan tidak gampang lupa dengan penjelasan*

---

<sup>11</sup> Wawancara pada hari senin, 25 Februari 2019 pukul 11.00 wita, di SLB Negeri 1 Kabupaten Takalar.

*materi sosialisasi terutama tentang waktu dan tata cara memilih, biodata calon-calon bupati dan wakil bupati dengan programnya”.*

Model sosialisasi pertemuan tatap muka bagi Asdar baik dan efektif, namun intensitas sosialisasi yang masih kurang dan tidak didukung oleh alat bantu sosialisasi yang tepat, seperti selebaran atau buku dengan tulisan braille yang memuat informasi terkait tata cara dan jadwal pemungutan suara serta profil, visi misi dan program kandidat.

Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi oleh penyandang difabel netra kaitannya dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan Paslon adalah minimnya model pendekatan atau sosialisasi berupa audio dan cetakan *braille*. Sosialisasi berupa audio seperti media radio, televisi, dan komunikasi tatap muka yang menginformasikan mengenai tahapan Pilkada serta bahan sosialisasi dalam bentuk cetakan *braille* yang berisikan materi singkat tentang Pilkada. Dengan mengandalkan kemampuan pendengaran, materi sosialisasi sulit untuk diterima dan tidak dapat bertahan lama. Keterbatasan otak untuk mengingat menyebabkan penyandang disabilitas netra kurang mampu mengingat nama-nama calon dan mendapatkan kesulitan atau kebingungan memilih calon pemimpin (Rita et al., 2016). Model pendekatan yang dominan dilakukan dengan media gambar dan tulisan yang tentu saja menyulitkan bagi difabel netra.

### ***Respons Difabel Rungu (Tuli) / Wicara***

Penyandang difabel rungu (tuli) merupakan orang-orang yang memiliki keterbatasan atau gangguan dalam hal pendengaran. Gangguan pendengaran yang dialami sejak lahir biasanya diikuti oleh terbatasnya kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan, bahkan terkadang diikuti pula terbatasnya kemampuan untuk baca tulis bagi difabel rungu yang putus sekolah dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai di lingkungan keluarga.

Penyandang difabel rungu dan wicara merupakan pembelajar visual atau mengandalkan gambar dan segala hal yang dapat dilihat dalam proses belajar terhadap

fenomena di sekitarnya. KPU selaku penyelenggara memahami kondisi dan kebutuhan difabel rungu/wicara dengan menyiapkan penerjemah (interpreter) bahasa isyarat dalam pertemuan sosialisasi dan acara Debat Kandidat Pilkada Takalar melalui siaran televisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Risma, salah seorang pelajar difabel rungu/wicara di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Takalar yang ikut menggunakan hak pilihnya:

*“Saya mengetahui informasi tentang Pilkada melalui sosialisasi yang diadakan oleh KPU di sekolah dan juga acara debat kandidat di televisi. Saya paling senang dengan acara debat di televisi karena ada penerjemahnya, sehingga saya bisa tahu apa yang dibicarakan dalam debat”.*<sup>12</sup>

Pertemuan sosialisasi di sekolah dan Debat Kandidat dengan menampilkan penerjemah (interpreter) tidak hanya menimbulkan respons kognitif yang baik, tetapi juga secara afektif menimbulkan perasaan senang pada diri Risma yang terbatas kemampuannya dalam mendengar dan berbicara. Pemahaman dan usaha KPU dengan menghadirkan penerjemah pada kegiatan sosialisasi dan Debat Kandidat menunjukkan kepedulian KPU terhadap Risma dan seluruh difabel rungu/wicara.

Spanduk dan baligho merupakan model sosialisasi dalam bentuk gambar (visual) yang banyak dipasang oleh KPU dan tim Paslon untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Spanduk/baligho dipasang di tepi jalan sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat, termasuk bagi penyandang difabel rungu/wicara yang banyak mengandalkan indera penglihatan dalam mengenali dan merespons objek yang ada di sekitarnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurhikmah dalam bahasa isyarat, salah seorang penyandang difabel rungu/wicara yang ikut menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Takalar tahun 2017:

*“Saya mengetahui informasi tentang Pilkada dan Calon Bupati melalui spanduk dan baligho yang terpasang di sekitar desa. Saya bisa membaca jadi bisa tahu apa isinya spanduk itu. Hanya saya juga agak kecewa karena tidak pernah ada dari*

---

<sup>12</sup> Wawancara pada hari Kamis, 14 Februari 2019 pukul 11.00 wita, di SLB Negeri 1 Takalar

*KPU atau tim sukses yang datang sosialisasi ke rumah atau mengundang datang ke acara sosialisasi, supaya saya lebih tahu calon bupati dan programnya”.*<sup>13</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pemilih difabel rungu/wicara lainnya, yakni Jumaliah:

*“Kalau saya biasa lihat gambar-gambar calon bupati di spanduk yang banyak dipasang di jalanan. Jadi saya bisa tahu siapa saja calon bupati yang maju di Pilkada Takalar. Saya lebih mudah mengerti informasi melalui gambar, karena saya tidak bisa mendengar. Selain dari spanduk, keluarga dan teman-teman yang sampaikan ke saya untuk ikut memilih”.*<sup>14</sup>

Nurhikmah dan Jumaliah adalah pemilih difabel jenis rungu/wicara yang putus sekolah, namun memiliki kemampuan baca tulis sehingga mampu merespons objek-objek di sekitarnya dengan cukup baik, termasuk spanduk dan baligho. Nurhikmah dan Jumaliah merespons cukup positif karena melalui spanduk dan baligho yang terpasang di sekitar desanya.

Model pendekatan secara langsung kepada difabel rungu/wicara dengan menggunakan alat bantu selebaran, brosur dan sejenisnya juga penting, karena dapat memudahkan kedua belah pihak, baik KPU/Paslon dalam memberikan informasi dan pemahaman maupun pemilih untuk memahami maksud dari pihak KPU/Paslon, sehingga sosialisasi menjadi efektif dalam menyentuh sisi kognisi dan afeksi pemilih.

### ***Respons Difabel Daksa***

Difabel daksa merupakan seseorang yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna dan sifatnya menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi dan otot. Penyebabnya dapat bermacam-macam, seperti penyakit atau karena kecelakaan yang membuat seseorang terbatas dalam melakukan gerakan-gerakan. Keterbatasan dalam bergerak atau adanya kelainan pada anggota tubuh yang dimiliki membuat sebagian dari difabel daksa terbatas pula dalam bergaul di tengah masyarakat.

---

<sup>13</sup> Wawancara pada hari sabtu, 24 November 2018 pukul 13.00 wita, di rumah informan, Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Takalar.

<sup>14</sup> Wawancara pada hari sabtu, 1 Desember 2018 pukul 16.30 wita, di rumah informan, Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Takalar.

Sosialisasi Pilkada baik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Takalar maupun Paslon seharusnya memahami kondisi dan kebutuhan dari difabel daksa. Hal ini karena keterbatasan dalam bergerak yang dialami oleh difabel daksa, sehingga pihak KPU dan Paslon yang seharusnya lebih pro aktif dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan orang per orang atau *door to door*. KPU Kabupaten Takalar telah berkoordinasi dengan seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Takalar dengan mengirimkan data difabel di masing-masing desa dan kelurahan dengan harapan agar setiap difabel dapat mendapatkan sosialisasi dan layanan terkait pemenuhan hak politik dalam Pilkada Takalar. Namun, pendekatan sosialisasi secara khusus yang diharapkan dapat dilakukan oleh PPS kepada difabel masih sangat minim bahkan dapat dikatakan tidak ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sukmawati daeng Bayang, salah seorang penyandang difabel daksa yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Takalar tahun 2017:

*“Saya tidak ikut memilih saat Pilkada karena sakit demam. Tapi persoalannya juga karena tidak pernah ada sosialisasi dari KPU atau PPS di desa ini yang datang misalnya ke rumah untuk sosialisasi tentang Pilkada. Begitu juga dengan tim sukses tidak pernah ada yang datang sosialisasi”.*<sup>15</sup>

Pernyataan Sukmawati daeng Bayang menggambarkan perasaan kecewa terhadap KPU/PPS dan Tim Paslon yang tidak melakukan sosialisasi Pilkada secara langsung. Tidak adanya sosialisasi atau pendekatan secara langsung kepada difabel daksa menunjukkan kurangnya pengertian dan perhatian nyata dari KPU/PPS dan Tim Paslon untuk memenuhi hak politik dan informasi dari difabel daksa. Hal ini sejalan dengan penelitian Rita et al.(Rita et al., 2016) bahwa sosialisasi tatap muka hanya di komunitas atau organisasi penyandang disabilitas, sedangkan tidak semua penyandang disabilitas masuk ke dalam komunitas atau organisasi yang ada. Memang ada media seperti televisi untuk mengetahui informasi terkait Pilkada, namun pendekatan dari penyelenggara dan peserta Pilkada kepada difabel secara langsung ini juga penting, karena pada dasarnya masyarakat khususnya difabel butuh untuk disapa dan didekati,

---

<sup>15</sup> Wawancara pada hari sabtu, 24 November 2018 pukul 11.55 wita, di rumah informan, Desa Tarawang, Kecamatan Galesong Selatan, Takalar.

sehingga difabel merasa diperhatikan dan terdorong kesadarannya untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih di tengah keterbatasan yang dimiliki.

Informan psikolog mengemukakan sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan emosional dan individual yang dilakukan oleh *Pemangku kepentingan* Pilkada utamanya KPU jauh hari sebelumnya. Karena untuk membangun kesadaran dan sikap politik dari dalam diri masyarakat difabel tidak cukup melalui media atau alat peraga, tapi dengan pendekatan langsung seperti didatangi, disapa dan diberdayakan sesuai dengan kemampuan difabel, sehingga terbangun rasa suka dahulu. Sosialisasi secara langsung di tengah masyarakat merupakan model atau metode yang menarik bagi pemilih difabel daksa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wati, salah seorang penyandang difabel daksa yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Takalar tahun 2017:

*“Tidak ada dari pihak KPU yang datang melakukan sosialisasi. Tapi pernah sekali ada Pak Hairil Anwar dari PKS yang datang di lapangan dekat rumah melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan pak Syamsari sebagai Calon Bupati Takalar. Saya rasa ini bagus karena saya bisa lebih tahu mengenai Pak Syamsari dan suasananya juga ramai, jadi saya tertarik bersama keluarga untuk melihat acara sosialisasi itu”.<sup>16</sup>*

Respons positif oleh Wati menunjukkan bahwa difabel pada dasarnya merasa senang apabila didatangi dan didekati oleh Paslon atau tim untuk diberikan sosialisasi politik. Secara kognitif, adanya sosialisasi dari salah satu tim Paslon ini menambah pengetahuan Wati tentang profil dan program Paslon yang bertarung di Pilkada Takalar. Model sosialisasi atau pendekatan berupa pertemuan tatap muka secara langsung kepada pemilih difabel tidak hanya minim dirasakan oleh para penyandang difabel pada Pilkada Takalar tahun 2017, tetapi juga pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Pada umumnya, sosialisasi yang didapatkan hanya berupa spanduk dan baligho yang isinya singkat dan kurang jelas. Hal ini membuat ada di antara penyandang difabel di Takalar yang merasa

---

<sup>16</sup> Wawancara pada hari sabtu, 24 November 2018 pukul 11.30 wita, di rumah informan, Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Takalar.

biasa saja atau tidak peduli apabila tidak ada sosialisasi dan pendekatan secara langsung yang dilakukan oleh pihak KPU dan Paslon.

### **IMPLIKASI TEORITIK**

Psikologi politik menyangkut penjelasan tentang kebiasaan yang dilakukan orang-orang, dengan mengadaptasi konsep-konsep psikologi, sehingga konsep-konsep ini bermanfaat dan relevan dengan politik, kemudian mengaplikasikannya pada analisis tentang suatu masalah atau isu politik (Saliyo, 2014). Pada intinya, psikologi politik menyangkut pikiran, emosi, dan perilaku manusia dalam suatu sistem politik tertentu. Penyandang difabel sebagaimana manusia atau warga negara lainnya memiliki pikiran, emosi dan perilaku khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Takalar tahun 2017.

Pendekatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Takalar salah satunya adalah dengan merekrut Relawan Demokrasi dari kalangan difabel. Difabel yang direkrut menjadi Relawan Demokrasi bertugas antara lain untuk melakukan sosialisasi tatap muka dan pendekatan kepada kelompok difabel. Alasan perekrutan difabel Relawan Demokrasi segmen difabel karena secara psikologis sosok difabel dapat lebih diterima di kalangan difabel lainnya, sehingga sosialisasi mengenai Pilkada Takalar yang dilakukan dapat diterima dengan baik, lebih dipahami karena memiliki kesamaan bahasa dan kondisi.

Kelompok difabel merupakan segmen pemilih yang memiliki keterbatasan indera, sehingga membutuhkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Sosialisasi dan pendekatan kepada kelompok difabel dalam Pilkada Takalar haruslah memperhatikan aspek kualitas, sehingga dapat efektif, diterima dengan baik dan mengakibatkan perubahan perilaku difabel menjadi pemilih cerdas yang aktif menyalurkan hak pilihnya. Aspek kualitas di sini meliputi model pendekatan yang tepat dengan memperhatikan aspek psikologis difabel dan sesuai dengan kebutuhan pemilih difabel. Kelompok difabel memiliki beberapa jenis difabilitas, diantaranya difabel buta (netra), difabel tuli/wicara, difabel daksa, dan lain-lain. Masing-masing jenis difabilitas membutuhkan model sosialisasi dan pendekatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

## KESIMPULAN

KPU Kabupaten Takalar dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar merupakan *pemangku kepentingan* yang paling berperan dalam menjalankan sosialisasi politik kepada kelompok difabel. Adapun model pendekatan psikologi politik yang dilakukan adalah berupa sosialisasi tatap muka, alat peraga sosialisasi, dan penyediaan penerjemah bahasa isyarat (interpreter) untuk difabel rungu/wicara. Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM untuk berkomunikasi secara langsung kepada berbagai jenis difabel membuat KPU Kabupaten Takalar melakukan pendekatan dan membuka ruang kepada pihak-pihak yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat diterima di kalangan difabel seperti Relawan Demokrasi segmen difabel, guru SLB dan organisasi difabel untuk melakukan sosialisasi atau komunikasi tatap muka kepada kelompok difabel. Pendekatan psikologi politik Kedua Paslon relatif sama. Kedua Paslon menggunakan model sosialisasi menggunakan APK dan Media Masa. Hanya saja, untuk Paslon nomor 1, mereka menggunakan sosialisasi melalui Dinas Sosial yakni anggaran dana untuk pendamping bantuan sosial. Sedangkan, Paslon nomor 2 menggunakan media sosialisasi *door to door*. Sedangkan untuk respon kelompok difabel terhadap pendekatan psikologi yang dilakukan oleh KPU dan Paslon Bupati Takalar mayoritas merespon positif.

Secara afektif, difabel netra merasa antipati dan ketidaknyamanan terhadap model pendekatan yang dominan dilakukan oleh KPU dan Paslon dalam bentuk gambar dan tulisan. Meskipun begitu mereka masih dapat mendengarkan sosialisasi melalui televisi maupun radio. Penyandang difabel rungu/wicara juga merespons positif berbagai model pendekatan yang dilakukan oleh KPU dan Paslon, khususnya dengan adanya penerjemah (interpreter) dan model pendekatan lainnya dalam bentuk gambar dan tulisan seperti alat peraga sosialisasi/kampanye. Namun, secara afektif penyandang difabel merasakan kekecewaan terhadap minimnya perhatian dalam bentuk sosialisasi tatap muka dari pihak KPU dan tim Paslon. Sedangkan, penyandang difabel daksa tidak mendapatkan kendala yang signifikan dalam memahami model pendekatan. Mereka yang berada di SLB merespons positif karena adanya sosialisasi secara langsung dari pihak KPU dan tidak merasakan kendala yang signifikan. Namun, bagi difabel daksa secara umum/non pelajar SLB dan memiliki keterbatasan dalam bergerak atau

berpindah tempat, merasakan kekecewaan bahkan menimbulkan sikap apatis karena minimnya perhatian dalam bentuk sosialisasi tatap muka dari pihak KPU dan Paslon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. R., & Abidin, M. (2021). Urgensi komunikasi model stimulus organism response (S-O-R) dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 74–90.
- Amrurrobi, A. A., Pahlevi, M. E. T., & Kalpiando, R. (2021). Tantangan pemilih difabel dalam pelaksanaan pemilihan serentak 2020 di tengah pandemi covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(2), 125–140.
- Aritonang, D. R., & Gatra, S. (2014). *KPU Diapresiasi Sediakan Penerjemah Bahasa Isyarat Saat Debat Capres*. Kompas.Com.
- Fadlillah, L. S. (2019). *Strategi komunikasi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan dalam sosialisasi program jaminan hari tua*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Merly, M. (2016). AKSESIBILITAS PEMILU 2014 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(2), 61. <https://doi.org/10.22146/jkn.8123>
- Muluk, H., Cottam, M. L., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., Preston, T., & Tjo, E. (2012). *Pengantar Psikologi*. Rajawali Pers.
- Nurbeti, N., & Chandra SY, H. (2021). Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat. *KERTHA WICAKSANA*, 15(2), 130–137. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.130-137>
- O. Yandarisman, F. ., and N. R. H. (2014). PERAN PANITIA PEMILIHAN UMUM AKSES PENYANDANG CACAT (PPUA PENCA) DALAM SOSIALISASI POLITIK BAGI MASYARAKAT DIFABEL DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DKI JAKARTA

2013. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(2), 311–325.
- Rita, M. D., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2016). Role of KPU in Socialisation Pemilukada with Disabilities in the City Bandar Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 4(1).
- Riwanto, A. dkk. (2018). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal. *Journal Unnes*, 4(3).
- Salim, I. dkk. (2015). *Difabel Merebut Bilik Suara*. Sigab.
- Saliyo, S. (2014). Studi Psikologi Politik Menakar Kepribadian Perempuan dalam Panggung Politik. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(2), 291–312.
- Setyaningsih, R., & Gutama, T. A. (2016). Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel (Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 31(1), 42–52.
- Waisnawa, I. K. G. S., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(11), 1–12.